

ANALISIS PERKEMBANGAN IPM NTB 2010-2014

LALU MUH. KABUL

Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Mataram

e-mail: Kabullpp@yahoo.com

ABSTRACT

Human development can be seen as a process of expanding the real freedom that people enjoy. Viewing development in term of expanding substantive freedoms directs attention to the ends that make development important, rather than merely to some of the means that, inter alia, play a prominent part in the process. Human Development Index (HDI) is an indicator to measure the progress of human development achieved. Human development was applied intensively as a development approach in West Nusa Tenggara (NTB) since 2008. The old method of HDI (method 1991-2010) has been changed by a new method (method 2011). By the new method, HDI ranking of West Nusa Tenggara (NTB) has been improved during 2010-2014. Meanwhile, HDI of West Nusa Tenggara (NTB) graph during 2010-2014 create "L Curve". In the future, it's important to formulate a new strategic policy in order to improve sustainability of West Nusa Tenggara (NTB) HDI.

Keywords: Human Development Index, L Curve, Strategic policy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan manusia telah digunakan sebagai pendekatan pembangunan dunia sejak tahun 1990 oleh badan program pembangunan dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP. Menurut Amartya Sen (1999) bahwa pembangunan manusia berkaitan dengan konsep kefungisian (*functioning*) dan kemampuan manusia (*human capability*). Dalam bukunya *Development As Freedom*, Amartya Sen, Master di Trinity College Universitas Cambridge Inggris dan peraih Hadiah Nobel Bidang Ilmu Ekonomi pada tahun 1998 ini menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas kebebasan yang dapat dinikmati oleh manusia.

Dalam pada itu, kefungisian berkaitan dengan dengan berbagai hal yang oleh seseorang bernilai atau menjadi bernilai untuk dilakukan. Boleh jadi orang memiliki kefungisian sama, tetapi kemampuan seseorang berbeda dengan orang lainnya. Dengan kemampuannya itu, setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan berbagai pilihan yang dapat dinikmatinya.

Misalnya, boleh jadi orang terdidik dan orang tidak terdidik memiliki kefungisian yang sama, misalnya tidak membaca koran. Dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, orang terdidik memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang tidak terdidik. Dengan kemampuannya itu, orang terdidik mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan, apakah ia mau membaca koran itu atau tidak membacanya. Berbeda dengan orang tidak terdidik (buta aksara) dimana ia sama sekali tidak memiliki pilihan lain, terpaksa tidak membaca koran tersebut karena memang ia tidak bisa membaca.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, bukanlah pada seberapa besar pertumbuhan ekonomi, melainkan pada seberapa besar dari pertumbuhan ekonomi itu yang didistribusikan untuk mendukung pengembangan pendidikan dan kesehatan baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang (UNDP, 1990). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia juga meletakkan pembangunan di sekeliling manusia dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Keberhasilan Jepang sebagai negara industri maju di Asia ternyata tidak dimulai dari revolusi industri seperti pengalaman negara-negara Eropa. Jepang justru memulainya dengan pembangunan manusia pada pertengahan abad ke 19 berupa pengentasan buta aksara pada masa restorasi Meiji (Hiromitsu Ishi, 1995). Dan pada masa itu, tingkat melek aksara di Jepang lebih tinggi daripada negara-negara Eropa. Bahkan pada

waktu itu belum ada industrialisasi di Jepang, tetapi di Eropa industrialisasi telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun saat ini, kemajuan yang telah dicapai Jepang setara dengan negara-negara Eropa.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia digunakan “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Nilai IPM NTB pada tahun 2007 mencapai 63,71 dan 64,00 pada tahun 2008. Meskipun mengalami kenaikan, tetapi peringkat (*ranking*) IPM NTB tidak juga berubah dan tetap saja berada pada peringkat 32 dari 33 provinsi pada tahun 2007 maupun 2008. Oleh karena itu, maka diperlukan terobosan baru dalam peningkatan IPM NTB. Mengutip Suara NTB (2008) terobosan baru itu adalah Gerakan 3-A, yaitu Angka Buta Aksara Menuju Nol (disingkat ABSANO), Angka Drop Out Menuju Nol (disingkat ADONO), dan Angka Kematian Ibu Menuju Nol (disingkat AKINO).

Dalam perkembangannya, terobosan baru tersebut memang mampu menaikkan nilai IPM NTB dalam periode 2009-2013, tetapi peringkatnya dalam periode 2009-2012 tidaklah berubah, yakni pada peringkat 32 dari 33 provinsi. IPM NTB tahun 2013 bahkan berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi. Nilai IPM NTB 2009-2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung dengan metode lama yang telah digunakan sejak tahun 1991. Pada tahun 2011, UNDP merevisi metode lama tersebut (*metode 1991-2010*) kemudian diganti dengan metode baru (*metode 2011*). Metode baru ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baru diterapkan pada tahun 2014.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana perhitungan IPM NTB 2010-2014 dengan metode baru dan metode lama?, (2) Bagaimana perkembangan nilai IPM NTB 2010-2014 dengan metode baru dan metode lama?, (3) Bagaimana peringkat (*ranking*) IPM NTB 2010-2014 dengan metode baru dan metode lama dan bentuk grafiknya?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Mengetahui perhitungan IPM NTB 2010-2014 dengan metode baru dan metode lama, (2) Mengetahui perkembangan nilai IPM NTB 2010-2014 dengan metode baru dan metode lama, (3) Mengetahui perbaikan peringkat (*ranking*) IPM NTB 2010-2014 dengan metode baru dan metode lama dan bentuk grafiknya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan *mixing methods*, yaitu kuantitatif dan kualitatif (Brannen, 1993). Pelaksanaan penelitian ini meliputi 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilakukan studi pustaka (*desk study*) dimana pada tahap ini merupakan proses penelaahan dan sintesa dari berbagai data sekunder kuantitatif, utamanya data BPS.

Hasil dari studi pustaka pada tahap pertama tersebut selanjutnya dijadikan bahan untuk didiskusikan pada tahap kedua melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dan informasi, pembelajaran serta perspektif dari para pakar, praktisi dan institusi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Perhitungan IPM

Dalam metode lama perhitungan IPM (*metode 1991-2010*) terdapat 3 (tiga) dimensi yang dijadikan dasar dalam perhitungan IPM, pertama: dimensi umur panjang dan sehat, kedua: dimensi pengetahuan dan keterampilan, ketiga: dimensi kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dimensi pengetahuan dan keterampilan diukur menggunakan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*). Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran riil kapita atau kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Setiap indikator diintegrasikan kedalam 3 (tiga) indeks untuk memperoleh indeks komposit dari IPM dengan metode agregasi rata-rata aritmatika atau rata-rata hitung. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100.

Dalam metode baru perhitungan IPM (*metode 2011*) indikator Angka Melek Huruf (AMH) dalam dimensi pengetahuan dan keterampilan diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*). Dan hal paling mendasar dalam metode baru ini, metode agregasi yang digunakan bukanlah

rata-rata aritmatika, melainkan rata-rata geometri atau rata-rata ukur. Disisi lain, rata-rata geometri ini dalam metode baru juga digunakan dalam menghitung indeks pendidikan. Sementara, pada metode lama, indeks pendidikan ini dihitung menggunakan rata-rata aritmatika. Perbedaan mendasar antara metode lama dan metode baru perhitungan IPM secara lebih rinci ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Metode Lama dan Metode Baru Perhitungan IPM

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)
Pengetahuan dan keterampilan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)
	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
	Indeks pendidikan (rata-rata aritmatika)	Indeks pendidikan (rata-rata geometri)
Kehidupan yang layak	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP)	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP)
Metode agregasi	Rata-rata aritmatika	Rata-rata geometri

Sumber: UNDP (2011) dan BPS (2014)

Perkembangan IPM NTB 2010-2014

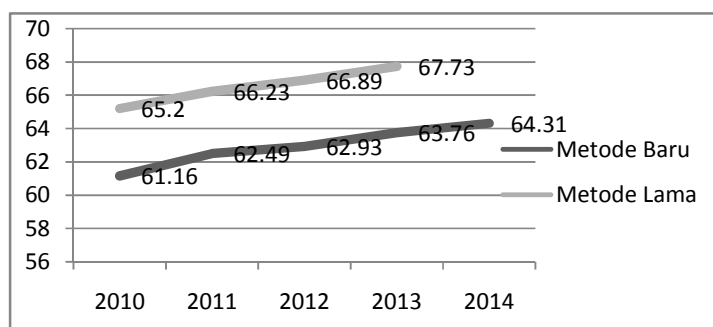
Sejak tahun 2008, Gerakan peningkatan IPM di NTB dilakukan utamanya pada dimensi umur panjang dan sehat serta dimensi pengetahuan dan keterampilan. Gerakan ABSANO dan ADONO merupakan terobosan pada dimensi pengetahuan dan keterampilan. Gerakan ABSANO tampaknya diikhtiarakan untuk menihilkan angka buta aksara. Gerakan ADONO adalah ikhtiar guna meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara, Gerakan AKINO adalah terobosan pada dimensi umur panjang dan sehat dan sekaligus pula ikhtiar guna meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH).

Perhitungan IPM oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan di seluruh provinsi, yakni 33 provinsi dalam periode 2010-2012. Sedangkan sejak tahun 2013 perhitungan IPM dilakukan pada 34 provinsi berkaitan dengan lahirnya 1 (satu) provinsi lagi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Perkembangan capaian IPM NTB 2010-2014 dengan metode lama dan metode baru ditampilkan pada gambar 2. Dengan metode lama, nilai IPM NTB mencapai 65,20 pada tahun 2010 dan naik lagi menjadi 66,23 pada tahun 2011 serta terus mengalami kenaikan menjadi 66,89 pada tahun 2012 dan 67,73 pada tahun 2013. Dengan metode baru, nilai IPM NTB pada tahun 2010 mencapai 61,16 kemudian naik menjadi 62,49 pada tahun 2011 dan terus mengalami kenaikan menjadi 62,93 pada tahun 2012 kemudian 63,76 pada tahun 2013 dan 64,31 pada tahun 2014.

Cara membandingkan peringkat (*ranking*) IPM yang benar adalah membandingkan peringkat IPM pada tahun yang berbeda, tetapi dengan metode perhitungan yang sama. Artinya, disatu sisi kita bisa membandingkan peringkat IPM pada tahun yang berbeda untuk nilai IPM yang dihitung dengan metode baru. Disisi lain kita juga bisa membandingkan peringkat IPM pada tahun yang berbeda untuk nilai IPM yang telah dihitung dengan metode lama. Tetapi keliru jika yang dibandingkan itu adalah peringkat IPM pada tahun yang berbeda, tetapi dengan metode perhitungan yang berbeda pula. Sehingga keliru jika ada pernyataan bahwa IPM NTB pada tahun 2013 berada pada peringkat 33 kemudian naik menjadi peringkat 30 pada tahun 2014. Dikatakan keliru karena nilai IPM tahun 2013 dan 2014 masing-masing dihitung dengan metode yang berbeda dimana IPM tahun 2013 dihitung dengan lama dan IPM tahun 2014 dihitung dengan metode baru.

Dengan metode lama, peringkat (*ranking*) IPM NTB 2010-2012 tidak juga berubah masih tetap bertenger pada peringkat 32 dari 33 provinsi dan peringkat 33 ditempati oleh Papua. Bahkan pada tahun 2013 peringkat IPM NTB melorot menjadi peringkat 33 dari 34 provinsi dan Papua berada pada peringkat 34. Dengan metode baru, justru situasinya menjadi berbeda dimana IPM NTB mengalami perbaikan peringkat menjadi peringkat 29 dari 33 provinsi dalam periode 2010-2012 dan berada peringkat 30 dari 34 provinsi dalam periode 2013-2014.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Capaian Nilai IPM NTB 2009-2014



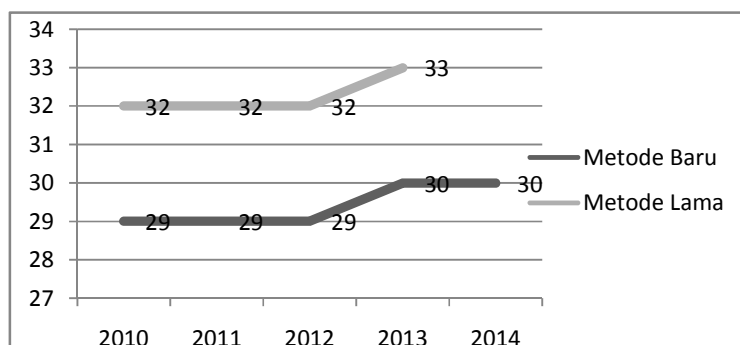
Sumber : BPS (2010-2012), BPS 2013 dan BPS 2014

Dengan metode baru, dalam periode 2010-2012 IPM NTB berada pada peringkat 29, NTT pada peringkat 30, Sulawesi Barat pada peringkat 32, Papua Barat pada peringkat 32 dan Papua pada peringkat 33. Sedangkan dalam periode 2013-2015 IPM NTB berada pada peringkat 30, NTT pada peringkat 31, Sulawesi Barat pada peringkat 32, Papua Barat pada peringkat 33 dan Papua pada peringkat 34. Grafik peringkat IPM NTB periode 2010-2014 dengan metode lama maupun metode baru membentuk “Kurva L” sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.

Alasan penggantian Angka Melek Huruf (AMH) dengan Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years Schooling*), yakni pada tataran internasional tingkat buta aksara telah berhasil dihilangkan. Dalam konteks NTB, ini tampaknya selaras dengan Gerakan ABSANO sebagai terobosan menihilkan angka buta aksara. Tingkat buta aksara di NTB pada tahun 2007 yang semula mencapai 17,56 persen berhasil dihilangkan pada tahun 2013 melalui Gerakan ABSANO. Tingkat buta aksara di NTB pada tahun 2007 yang semula mencapai 17,56 persen berhasil dihilangkan pada tahun 2013 melalui Gerakan ABSANO

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa metode agregasi yang digunakan dalam metode baru itu adalah rata-rata geometri, berbeda dengan metode lama yang menggunakan rata-rata aritmatika. Makna rata-rata geometri ini dalam bahasa pembangunan, yakni ketiga dimensi IPM tidaklah terpisah, antara satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berkaitan. Dimensi pendidikan adalah kunci guna meraih pendapatan yang lebih baik pada dimensi pendapatan. Pada tingkat pendapatan lebih baik, maka dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan menjadi perhatian utama. Disisi lain, dimensi pendidikan merupakan penentu utama dimensi kesehatan (Jones, 2009). Oleh karena itu, saling keterkaitan dan sinergi dari ketiga dimensi IPM merupakan isu substantif kedepan bagi keberlanjutan perbaikan peringkat IPM NTB. .

Gambar 2. “Garfik L” IPM NTB



Sumber : BPS (2010-2012), BPS 2013 dan BPS 2014

Isu substantif lainnya dan juga sangat mendasar, yakni “Kebocoran IPM”. Dalam *Human Development Report 2011* Kebocoran IPM ini identik dengan istilah *loss gain* (UNDP,2011). Berkaitan dengan kebocoran tersebut dikenal IPM Potensial dan IPM Aktual. IPM Potensial merupakan IPM ideal yang oleh suatu daerah potensial untuk dicapai, jika tidak ada Kebocoran IPM. Sedangkan IPM Aktual adalah capaian IPM riil suatu

daerah karena adanya Kebocoran IPM. Dengan demikian, IPM Aktual yang dicapai akan makin rendah, jika Kebocoran IPM makin tinggi. Bagaimana terjadinya Kebocoran IPM di NTB?

Untuk mengetahui terjadinya Kebocoran IPM di NTB kita perlu memahami terlebih dahulu tentang konsep penduduk karena yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM NTB tentunya adalah penduduk NTB. Menurut Hisbullah (2012) dalam konsep baku kependudukan yang digunakan di Indonesia, seseorang akan dicatat di suatu wilayah sebagai penduduk bukan karena KTP-nya, melainkan secara *de facto* apakah yang bersangkutan telah menetap di suatu wilayah tersebut dalam suatu periode tertentu atau berniat untuk menetap melampaui periode tertentu tersebut. Biasanya periode rujukan ini adalah 6 bulan.

Mengacu pada konsep baku kependudukan tersebut, maka yang termasuk dalam kategori “Penduduk NTB” adalah setiap orang yang telah menetap di wilayah NTB selama 6 bulan atau berniat untuk menetap di wilayah NTB lebih dari 6 bulan. Sedangkan, setiap orang asal NTB yang telah meninggalkan wilayah NTB selama 6 bulan atau berniat untuk meninggalkan wilayah NTB lebih dari 6 bulan termasuk dalam kategori bukan lagi penduduk NTB. Berdasarkan konsep ini, maka siapapun yang telah meninggalkan wilayah NTB, walau hanya sehari, tergolong bukan lagi penduduk NTB kalau niatnya akan meninggalkan wilayah NTB lebih dari 6 bulan.

Dari konsep baku kependudukan tersebut dapat dipahami jika buruh migran (TKI) asal NTB yang kini bekerja di luar negeri tergolong dalam kategori bukan lagi penduduk NTB, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM NTB. Demikian pula dengan setiap orang asal NTB yang kini tinggal di daerah (provinsi) lain dengan tujuan melanjutkan pendidikan ataupun bekerja juga tergolong bukan lagi penduduk NTB, tetapi tercatat sebagai penduduk provinsi lain. Sehingga kontribusinya adalah pada peningkatan IPM Provinsi lain dan bukan pada peningkatan IPM NTB. Oleh karena itu, maka tingkat Kebocoran IPM ini juga menjadi isu substantif yang juga perlu diperhatikan kedepan bagi keberlanjutan perbaikan IPM NTB. Berdasarkan isu substantif ini, maka perlu dikembangkan berbagai kebijakan strategis yang baru bagi keberlanjutan perbaikan peringkat IPM NTB kedepan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Metode lama perhitungan IPM (*metode 1991-2010*) telah direvisi oleh UNDP sejak tahun 2011 dan diganti dengan metode baru (*metode 2011*). Pada metode baru, Angka Melek Huruf (AMH) untuk dimensi pengetahuan dan keterampilan diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan penggunaan rata-rata aritmatika dalam perhitungan indeks pendidikan juga diganti dengan rata-rata geometri. Metode agregasi, yakni rata-rata aritmatika pada metode lama diganti dengan rata-rata geometri pada metode baru.
2. Penggunaan metode baru tersebut di Indonesia baru diterapkan oleh BPS pada tahun 2014. Dengan metode baru diperoleh nilai IPM NTB sebesar 61,16 (2010); 62,49 (2011); 62,93 (2012); 63,76 (2013) dan 64,31 (2014). Nilai IPM NTB dengan metode lama yakni sebesar 65,20 (2010); 66,23 (2011); 66,89 (2012) dan 67,73 (2013).
3. Grafik peringkat (*ranking*) IPM NTB 2010-2014 baik dengan metode baru maupun metode lama membentuk “Kurva L”. Dengan metode lama, peringkat IPM NTB 2010-2012 masih tetap bertengger pada peringkat 32 dari 33 provinsi dan tahun 2013 melorot menjadi peringkat 33 dari 34 provinsi. Dengan metode baru, justru situasinya menjadi berbeda dimana IPM NTB mengalami perbaikan peringkat menjadi peringkat 29 dari 33 provinsi dalam periode 2010-2012 dan berada peringkat 30 dari 34 provinsi dalam periode 2013-2014

Saran-saran

1. Terdapat 2 (dua) isu substantif yang perlu diperhatikan bagi keberlanjutan peningkatan IPM NTB kedepan, yaitu saling keterkaitan dan sinergi dimensi IPM dan kebocoran IPM.
2. Kedua isu substantif tersebut perlu dirumuskan sebagai kebijakan strategis yang baru dan dijabarkan dalam *action plan* keberlanjutan perbaikan IPM NTB kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2010. *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Indeks Pembangunan Manusia 2011-2012*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2014. *Indeks Pembangunan Manusia: Metode Baru*. BPS, Jakarta.
- Brannen Julia, 1993. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Avebury, England.
- Hiromitsu Ishi, 1995. *Trends in the Allocation of Public Expenditure in Light of Human Resources Development: Overview in Japan*. Asian Development Bank, Manila.
- Hisbullah Jousairi, 2012. *Tangguh Dengan Statistik: Akurat Dalam Membaca Realita Dunia*. Nuansa Cendekia, Bandung.
- Jones, Gavin W., 2009. *Population and Poverty: The Situation in Asia and the Pasific*, dalam. Asia Pasific Population Journal, Vol.24 No.1 April 2009 hlm.65-86.
- Sen, Amartya, 1999. *Development As Freedom*. Oxford, Oxford University Press.
- Suara NTB, 2008. *AKINO-ABSANO-ADONO: Terobosan Baru Menuju NTB BerSAING*. Mataram.
- UNDP, 1990. *Human Development Report 1990*. New York, Oxford University Press.
- UNDP, 1991. *Human Development Report 1991*. New York, Oxford University Press.
- UNDP, 2011. *Human Development Report: Sustainability and Equity*. New York, Oxford University Press.